

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperluas jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi memengaruhi hubungan sipil-militer, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, kajian mengenai kebijakan tersebut masih didominasi oleh perspektif hukum positif, sedangkan analisis berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implikasi penambahan jabatan sipil bagi Tentara Nasional Indonesia terhadap sistem ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan Indonesia dan bagaimana penambahan jabatan sipil bagi Tentara Nasional Indonesia dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dari perspektif *fiqh siyāsah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertumpu pada konsep dan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif TNI secara ketatanegaraan, kebijakan ini mengaburkan batas tegas antara fungsi pertahanan dan administrasi publik, sementara dari sisi tata kelola pemerintahan, penempatan tersebut berisiko mendegradasi sistem merit dan memicu dualisme loyalitas yang mengancam netralitas serta profesionalisme birokrasi sipil. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, kebijakan tersebut dinilai belum sejalan dengan prinsip *al-'Adālah* dan *Al-Musāwah* karena menciptakan akses jabatan yang tidak proporsional serta membatasi ruang kompetisi bagi warga negara sipil. Selain itu, kebijakan ini belum memenuhi substansi *Asy-Syūrā* yang partisipatif dan berpotensi melanggar prinsip *Al-Mas'ūliyyah* akibat ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas hukum yang lahir dari dualisme otoritas antara rantai komando militer dan administrasi birokrasi sipil.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Jabatan Sipil, *Fiqh Siyāsah*, Supremasi Sipil.

ABSTRACT

The amendment of Law Number 34 of 2004 through Law Number 3 of 2025 has expanded the number of ministries and government agencies that can be occupied by active-duty soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This policy has sparked significant debate, as it is perceived to potentially affect civil-military relations, civilian supremacy, and governance. Conversely, existing studies on this policy remain dominated by a positive legal perspective, while analysis based on the *fiqh siyāsah* (Islamic political jurisprudence) perspective remains limited. This research aims to identify and explain the implications of expanding civil positions for the Indonesian National Armed Forces on the state administrative system and governance, and to examine this expansion within the revision of the Indonesian National Armed Forces Law from the perspective of *fiqh siyāsah*. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches, grounded in the concepts and principles of *fiqh siyāsah*. Data were gathered through literature review, utilizing primary, secondary, and non-legal sources, and subsequently analyzed using qualitative analysis with a descriptive-analytical approach. The research results indicate that from a constitutional standpoint, the expansion of civil positions for active-duty TNI soldiers blurs the clear boundary between defense functions and public administration. In terms of governance, such placements risk degrading the merit system and triggering dual loyalties, which threatens the neutrality and professionalism of the civil bureaucracy. From the perspective of *fiqh siyāsah*, this policy is considered inconsistent with the principles of *al-'Adālah* (justice) and *al-Musāwah* (equality) as it creates disproportionate access to positions and limits competitive opportunities for civilian citizens. Furthermore, this policy fails to fulfill the substance of a participatory *Asy-Syūrā* (consultation) and carries the potential to violate the principle of *Al-Mas'ūliyyah* (accountability) due to the ambiguity of legal accountability mechanisms arising from the dual authority between the military chain of command and the civil bureaucratic administration.

Keywords: Indonesian National Armed Forces, Civil Positions, *Fiqh Siyāsah*, Civilian Supremacy.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE